



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 3 Februari 2025/Periodik - 2024)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : PEMERINTAH PROVINSI JAMBI  
**UNIT KERJA** : BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : MUKTI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 733297

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** **Rp.** **4.778.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.070.000.000
2. Tanah Seluas 6.300 m2 di KAB / KOTA MUARO JAMBI, HASIL SENDIRI Rp. 1.050.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 1.000 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA JAMBI , HASIL SENDIRI Rp. 1.570.000.000
4. Tanah Seluas 1.883 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 170.000.000
5. Tanah Seluas 13.968 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 150.000.000
6. Tanah Seluas 14.008 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 145.000.000
7. Tanah Seluas 19.970 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HIBAH DENGAN AKTA Rp. 228.000.000
8. Tanah Seluas 12.960 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 120.000.000
9. Tanah Seluas 10.430 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 110.000.000
10. Tanah Seluas 20.049 m2 di KAB / KOTA MERANGIN, HASIL SENDIRI Rp. 165.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 276.000.000

1. MOBIL, MITSHUBISI SPORT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp.

270.000.000

2. MOTOR, YAMAHA NMAX Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp.

6.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. ----

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 677.910.186

**F. HARTA LAINNYA**

Rp. ----

Sub Total

Rp. 5.731.910.186

**III. HUTANG**

Rp. ----

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp. 5.731.910.186

## Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.